

Kolaborasi Internasional, CSPU Anugerahkan Gelar Kehormatan Untuk Guru Besar UPI



UZBEKISTAN - Hubungan kerja sama antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Chirchik State Pedagogical University (CSPU), Uzbekistan, terus berkembang. Pada Selasa, 27 Mei 2025, CSPU secara resmi memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Prof. Dr. Julia, M.Pd., sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat jejaring akademik internasional.

Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Prof. Jabbar Usarov, Dekan Fakultas Pedagogi

CSPU, yang menyatakan bahwa "Melalui pemberian profesor kehormatan ini, kini Prof. Julia merupakan bagian dari fakultas kami."

Bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan mencakup visiting professor, bimbingan mahasiswa magister secara lintas institusi, serta pengembangan publikasi ilmiah bersama. Hingga saat ini, telah dihasilkan beberapa proyek riset bersama serta artikel ilmiah yang sedang diproses di beberapa jurnal internasional. "Kolaborasi ini sangat penting

untuk pemingkatan universitas kita dan membuka peluang besar bagi pengembangan akademik lintas negara," ujar Prof. Dustnazar Khimmataliev, yang turut hadir dalam acara tersebut.

Dari pihak UPI, Dr. Indra Saffari, M.Pd., Direktur Kampus Sumedang, menyampaikan bahwa "Penghargaan ini menjadi penanda bahwa kolaborasi ilmiah yang dilakukan dengan semangat saling belajar dapat membuka peluang pengembangan yang luas di masa depan." (adv)



Pengelolaan Hutan Lestari Disorot FK3I

KOTA - Kebijakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem alam, dinilai tak memberikan dukungan dan hanya mementingkan pengusaha saja.

Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Nasional, Dedi Kurniawan menilai, Program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) gagal.

"Bahkan bisa berakibat pada kerusakan hutan serta ketimpangan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," katanya kepada Sumedang Ekspres melalui seluler, Senin (9/6).

Diketahui, Program KHDPK merupakan kebijakan pemerintah untuk mengelola 1,1 juta hektar hutan di Pulau Jawa, yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani, dengan fokus pada perhutanan sosial dan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, memperbaiki tata kelola hutan, dan memastikan kelestarian lingkungan.

Akan tetapi, menurut Dedi, kebijakan pemerintah itu justru membuka celah bagi para pengusaha, yang tujuannya materil dan mengabaikan keberlangsungan alam.

"Narasi Permen LHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), tentang Perhutanan Sosial, kami melihat sisi positif untuk ke-

sejahteraan masyarakat setelah Perhutani jika di Jawa dan Inhutani (PT Eksploitasi dan Industri Hutan) di luar Jawa, gagal mengelola hutan secara lestari," bebarnya.

Dedi menerangkan, bahkan kegagalan bukan sebatas pengelolaan yang buruk, tapi terlihat dari setiap tahun kerusakan hutan semakin meningkat.

"Dalih itulah yang memunculkan Program Perhutanan Sosial dengan skema pengelolaan hutan semakin meningkat. "Sangat disayangkan, kepentingan politik lagi-lagi masuk dan Program tersebut ditunggangi sebagai politik praktis, oleh penguasa dan pengusaha," jelasnya.

Menurut Dedi, kebijakan pemerintah pada Program KHDPK itu, dalam regulasinya sudah diatur, agar pihak pengusaha menjadi bagian dari Opteker Masyarakat.

Pasca UU (Undang-Undang Cipta Kerja) Perhutanan Sosial berganti nama menjadi KHDPK, dimana pointnya sama dan sedikit yang membedakan, bahwa pemerintah

daerah dapat memiliki kewenangan atas seizin Kementerian KLHK kala itu," ujarnya.

Megenai Perhutanan Sosial, apabila merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2020, tertuang bahwa aturan tersebut memberikan dasar hukum bagi perhutanan sosial, termasuk perizinan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Pasal 29A UU Cipta Kerja, secara eksplisit memungkinkan kegiatan perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi. Ini merupakan perubahan signifikan dari regulasi sebelumnya yang lebih terbatas.

Perhutanan Sosial juga dapat melibatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta alias pengusaha dalam pengelolaan hutan.

Dedi yang juga sebagai Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, menyoroti serius aturan dan kebijakan yang diambil pemerintah terkait Perhutanan Sosial, sebab hal tersebut dinilai lebih banyak dampak negatifnya, terlihat dari kerusakan lingkungan yang kian masif.

"Sebagai Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar, saya berperan strategis dan politis, memandang aturan ini mempermudah izin dalam kawasan hutan bagi masyarakat," ucapnya. (Bas)



JINAKAN API: Petugas Damkar Sumedang tengah mejinakan api warga Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal, baru-baru ini.

Dua Rumah Terbakar saat Ditinggal Sholat Idul Adha

JATINUNGGAL - Sial benar nasib Ujang Herman, 66, dan Sulim, 66, keduanya warga Dusun Legok, RT 01 RW 05 Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal.

Saat keduanya dan keluarganya menunaikan ibadah Sholat Idul Adha, rumah mereka terbakar. Peristiwa sendiri terjadi pada Jumat (6/6) sekitar pukul 06.45.

"Kami, Regu 2 UPT Pemadam Kebakaran Wilayah Damaraja menerima laporan adanya

dua rumah mengalami kebakaran dari warga," kata Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Sumedang Cece Ruhiat saat dihubungi Sumeks, baru-baru ini.

Dia mengatakan, penyebab kebakaran diduga dari tungku api yang lupa dimatikan. "Saat sholat idul adha korban Ujang Herman diduga lupa memadamkan api tungku sehingga api cepat membesar dan menjalar ke rumah pemilik kedua, Sulim," jelasnya.

Disebutkan, pemadaman api di kedua rumah tersebut membutuhkan waktu hampir tiga jam. Pemadaman dimulai pukul 07.00 dan selesai pukul 09.40," tukasnya.

Cece menerangkan, material yang terbakar di korban pertama, Ujang Herman, bangunan rumah dengan luas bangunan 12X10 m2 beserta satu unit motor Yamaha Byson.

Dia melanjutkan, kerugian materil Rp 40.000.000 dengan

aset terselamatkan sekitar Rp. 500.000.000.

"Sementara itu, korban kedua dengan rumah yang terbakar dengan luas bangunan : 8X8 m2 beserta satu unit motor Honda KF 70 dengan kerugian materil sekitar Rp 100.000.000 dengan aset terselamatkan sekitar Rp. 500.000.000," jelasnya.

"Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian tersebut," tukasnya. (bim)



FOTO: JABAR EKSPRES

Ilustrasi: Kawasan hutan di Bandung Raya beberapa waktu lalu.

Beritanya Selalu Hangat

Harian Pagi
SUMEDANG EKSPRES
Bacaan Utama Warga Sumedang



Berlangganan,
Hubungi Achmad Sofa 083829904636

Ingin Beriklan? ...

Yaaa di

Sumedang Ekspres

Hubungi:

Kantor: 0261 202174 atau Achmad Sofa 083829904636

Enteng Hargana Mucekil Hasilna